



**"Bidang 6: Rekayasa sosial, pengembangan pedesaan dan pemberdayaan masyarakat"**

**PEMETAAN KONDISI UMKM DI KABUPATEN BANYUMAS**

**Sri Lestari<sup>1</sup>, Dewi Susilowati<sup>1</sup>, Yusriyati Nur Farida<sup>1</sup>**

**<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jenderal Soedirman**

**ABSTRAK**

Penelitian bersifat *multiyears*. Secara umum bertujuan menemukan *key performance indicator* yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM, menyusun model dan merumuskan strategi pemulihan kinerja UMKM. Tahun pertama ditargetkan menghasilkan peta kondisi UMKM di Kabupaten Banyumas, mengidentifikasi *key performance indicator* dari setiap faktor lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi kinerja UMKM. Target tahun kedua menganalisis *key performance indicator* yang telah diperoleh pada tahun pertama yang menentukan kinerja UMKM dan menyusun model definitif pemulihan kinerja UMKM serta merumuskan strategi pemulihan kinerja UMKM yang tepat. Pada tahun ketiga model definitif dan rumusan strategi pemulihan kinerja UMKM telah diujicoba dan direvisi serta direkomendasikan kepada *stakeholder* UMKM di Kabupaten Banyumas.

Penelitian tahun pertama merupakan penelitian eksploratif. Tahun kedua dan ketiga menggunakan rancangan *case study*. Data menggunakan data primer dan sekunder. Tahun pertama pengumpulan menggunakan observasi, wawancara, kuesioner. Tahun kedua dan ketiga dengan FGD dan lokakarya. Informan dalam penelitian ini adalah *stakeholder* UMKM di Kabupaten Banyumas, sampel dengan *snowball sampling*. Metode analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang ditekankan pada model analisis perbandingan dan interpretasi data. Penentuan Strategi dengan menggunakan Analisis SWOT. Hasil penelitian ini dapat menjadi *role model* bagi dinas-dinas yang menangani UMKM yang lain di seluruh Indonesia.

Keyword : Kinerja UMKM, *Key Performance Indikator*, factor lingkungan eksternal dan internal

**ABSTRACT**

*This research is multi-year in nature. In general, it aims to find key performance indicators that can affect the performance of MSMEs, develop models and formulate strategies for recovering MSME performance. The first year is targeted to produce a map of the condition of MSMEs in Banyumas Regency, identifying key performance indicators of each internal and external environmental factor that affects the performance of MSMEs. The target for the second year is to analyze the key performance indicators that have been obtained in the first year which determine the performance of MSMEs and develop a definitive model for the recovery of MSME performance and formulate an appropriate MSME performance recovery strategy. In the third year the definitive model and formulation of the MSME performance recovery strategy have been tested and revised and recommended to MSME stakeholders in Banyumas Regency.*

*The first year of research is an exploratory research. The second and third years use a case study design. The data uses primary and secondary data. The first year of collection used observations, interviews, and*



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"*

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

---

*questionnaires. Second and third year with FGDs and workshops. Informants in this study were SMEs stakeholders in Banyumas Regency, the sample was snowball sampling. The analysis method uses qualitative analysis methods that emphasize the comparative analysis model and data interpretation. Determination of Strategy using SWOT Analysis. The results of this study can be a role model for agencies that handle other MSMEs throughout Indonesia.*

*Keyword: SMEs Performance, Key Performance Indicators, external and internal environmental factors*

## **PENDAHULUAN**

Usaha untuk mengembangkan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan salah satu aspek yang menjadi perhatian pemerintah dalam pembangunan ekonomi nasional. Usaha tersebut merupakan pondasi dalam sistem ekonomi kerakyatan yang ditujukan untuk mengurangi masalah ketimpangan pendapatan antar golongan dan antar masyarakat serta mengatasi permasalahan kemiskinan dan penyerapan tenaga kerja. Selain memiliki arti strategis bagi pembangunan.

Sektor UMKM merupakan sektor yang sangat strategis dalam perekonomian dan masyarakat Indonesia. Dikatakan demikian, mengingat sekitar 99% usaha-usaha yang ada di Indonesia merupakan usaha yang dikategorikan sebagai UMKM. Selain itu, sektor UMKM tersebut meliputi berbagai usaha yang bersifat padat karya, sehingga sektor ini mampu melibatkan sejumlah besar tenaga kerja yang tersedia.

Pada masa krisis ekonomi tahun 1998, sektor UMKM menjadi penopang ekonomi karena mayoritas belum mendapatkan akses finansial dan permodalan sehingga tidak terdampak krisis. Namun saat ini, sektor UMKM justru paling rentan atas imbas virus corona. Kajian yang dibuat oleh Kementerian Keuangan menunjukkan bahwa pandemi COVID-19 memberikan implikasi negatif bagi perekonomian domestik seperti penurunan konsumsi dan daya beli masyarakat, penurunan kinerja perusahaan, ancaman pada sektor perbankan dan keuangan, serta eksistensi UMKM. UMKM mengalami kerugian yang tak bisa dihindarkan akibat adanya pandemi COVID-19, karena produk yang dipasarkan sepi pembeli

Oleh karena itu studi tentang faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja UMKM pada masa pandemi COVID-19 serta penyusunan model untuk dapat memulihkan kinerja UMKM sangat diperlukan. Hal ini dibutuhkan karena dapat digunakan sebagai pedoman oleh UMKM dan dinas terkait dalam memulihkan kinerja UMKM.

Kinerja adalah hasil atau tingkat keberhasilan seseorang secara keseluruhan selama periode tertentu di dalam melaksanakan tugas dibandingkan dengan kemungkinan, seperti hasil kerja, target, sasaran atau kriteria yang telah ditentukan terlebih dahulu dan telah disepakati bersama. [4]. Kinerja mengacu pada tingkat capaian prestasi perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Kinerja (*performance*) pada perusahaan dapat dilihat dari tingkat penjualan perusahaan, tingkat margin, tingkat pengembalian modal, tingkat turnover dan pangsa pasar yang diraih [5]. Kinerja bisnis dipengaruhi oleh faktor internal dan faktor eksternal.

Lingkungan internal merupakan cerminan kekuatan atau kelemahan dari suatu organisasi perusahaan dan dapat mencerminkan kemampuan manajemen untuk mengelola perusahaan. Hal ini dapat menunjukkan kekuatan sumber daya, meliputi segala aspek material atau nonmaterial yang dimiliki perusahaan dalam menjalankan kegiatan usaha dan fungsinya untuk memproduksi secara komersial [6]. Lingkungan eksternal merupakan kondisi di luar perusahaan yang dapat mempengaruhi kehidupan perusahaan [6]. Faktor eksternal merupakan faktor-faktor yang berasal dari luar UMKM. Faktor tersebut bisa menghambat perkembangan UMKM.

Tantangan bagi dunia usaha, terutama pengembangan UKM, mencakup aspek yang luas, antara lain: (a) Peningkatan kualitas SDM dalam hal kemampuan manajemen, (b) organisasi dan teknologi, (c) Kompetensi kewirausahaan, (d) Akses yang lebih luas terhadap permodalan, (e) Informasi pasar yang



transparan, (f) Faktor input produksi lainnya, dan (g) Iklim usaha yang sehat yang mendukung inovasi, kewirausahaan dan praktek bisnis serta persaingan yang sehat. Pemilihan dan penetapan strategi (program) yang tepat sangat diperlukan agar UMKM dapat tetap bertahan dan bahkan memulihkan kinerjanya pada masa pandemi COVID-19 [7].

Studi tentang pengaruh faktor internal dan eksternal telah banyak dilakukan oleh para peneliti sebelumnya, namun penelitian sebelumnya dilaksanakan pada kondisi yang normal. Hasil penelitian dari para peneliti sebelumnya juga masih penuh perdebatan. Oleh karena itu perlu diteliti *key performance indicator* dari faktor internal dan eksternal yang benar-benar dibutuhkan oleh UMKM pada masa pandemi COVID-19 saat ini. *Key performance indicator* tersebut selanjutnya diuji pengaruhnya terhadap kinerja UMKM sehingga ditemukan teori baru. yang benar-benar tepat untuk memulihkan kinerja UMKM pada masa pandemi COVID-19 saat ini.

Penelitian yang telah dilakukan juga hanya menemukan pengaruh dari variabel eksternal dan internal terhadap kinerja UMKM, tanpa dilanjutkan dengan studi lebih lanjut bagaimana variabel-variabel tersebut digunakan untuk memulihkan kinerja UMKM dan meningkatkan daya saing UMKM. Apalagi pada masa pandemi COVID-19 ini, wirausahawan menghadapi kondisi yang berbeda dengan pada masa normal di saat penelitian-penelitian sebelumnya dilaksanakan.

Strategi (program) pengembangan untuk kedua kondisi tersebut secara spesifik pasti berbeda. Oleh karena itu diperlukan suatu studi yang matang dan mendalam (diagnosis) untuk mengetahui apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM pada masa pandemi COVID-19 ini dan bagaimana cara mengatasinya. Tanpa studi dan perencanaan yang matang, maka usaha program pengembangan akan menemui banyak kendala, misalnya : (1) salah sasaran, (2) sia-sia (mubazir), dan (3) banyak manipulasi dalam implementasinya.

Dengan demikian diperlukan model yang secara spesifik dapat digunakan untuk memulihkan kinerja UMKM pada masa pandemi ini. Model tersebut disusun dengan berbasis pada hasil pemetaan kondisi UMKM di Kabupaten Banyumas, *key performance indicator* yang secara spesifik benar-benar mempengaruhi kinerja UMKM yang kemudian disinergikan dengan berbagai komponen serta *stakeholder* yang dapat mempengaruhi pemulihan kinerja UMKM. Model yang telah disusun selanjutnya digunakan untuk menjadi dasar dalam perumusan strategi dan pengambilan kebijakan yang tepat dalam memulihkan kinerja UMKM

Kekhawatiran krisis ekonomi akibat pelemahan ekonomi global sebagai imbas pandemi COVID-19 telah menjadi ancaman besar bagi kelangsungan perekonomian nasional. Presiden Jokowi menjelaskan pada kuartal II-2020 ekonomi Indonesia berkontraksi minus 5,32 persen dan triwulan III-2020 berkontraksi minus 3,49 persen [8]. Data Kementerian Ketenagakerjaan per 20 April 2020 mencatat sebanyak 2.084.593 pekerja dari 116.370 perusahaan dirumahkan dan terkena Pemutusan Hubungan Kerja. Hal ini terjadi karena sejumlah perusahaan mengalami penurunan produksi bahkan berhenti berproduksi.

Hasil simulasi LIPI per Maret 2020 memproyeksi pertumbuhan ekonomi nasional hanya sebesar 1,9 -2,2 persen. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) menjadi salah satu sektor yang terpuruk akibat pandemi ini. Untuk mengetahui dampak pandemi terhadap kinerja UMKM, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) melalui Pusat Penelitian Ekonomi telah melakukan survei *on-line* pada Mei 2020 selama 2 bulan masa pandemi. Survei dilakukan terhadap 676 responden di 24 provinsi yang mayoritas berdomisili di pulau Jawa.

Hasil survey menunjukkan hampir 72,02 persen UMKM menyatakan tidak dapat mempertahankan usahanya hingga Oktober 2020, sebanyak 39,4 persen usaha terhenti, dan 57,1 persen usaha mengalami penurunan produksi. Untuk mengetahui bagaimana kondisi UMKM di Kabupaten Banyumas, apakah juga terdampak adanya pandemi COVID-19 atau tidak perlu dilakukan penelitian yang mendalam.



Berdasarkan data Dinnakerkop UKM Kabupaten Banyumas, terdapat sebanyak 5.754 Unit UMKM di Kabupaten Banyumas [10]. Terhadap UMKM tersebut perlu dilakukan pemetaan untuk mengetahui kondisinya, dicari indikator-indikator kunci yang dapat mempengaruhi kinerjanya, disusun model dan dirumuskan strategi yang dapat digunakan sebagai pedoman dan arah dalam memulihkan kinerja UMKM di Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini pada tahun pertama menargetkan berhasil menemukan *novelty* berupa *key performance indicator* dari setiap faktor lingkungan internal dan eksternal yang secara spesifik mempengaruhi kinerja UMKM pada masa pandemi COVID-19. Hal ini ditemukan dengan menggunakan *exploratory factor analysis*. Disamping penelitian ini pada tahun kedua dan ketiga juga menargetkan dapat menemukan *key performance indicator* yang benar-benar mempengaruhi kinerja UMKM di Kabupaten Banyumas, menyusun model dan merumuskan strategi guna memulihkan kinerja UMKM di Kabupaten Banyumas

Hal ini sangat penting dalam pengembangan ilmu manajemen karena sampai dengan sekarang teori-teori manajemen dihasilkan dari studi pada kondisi yang normal. Disamping itu penelitian yang sudah ada juga tidak dilanjutkan dengan penyusunan model dan perumusan strategi untuk mengatasi permasalahan yang ada sekarang. Hasil pemetaan kondisi UMKM, identifikasi *key performance indicator*, model dan rumusan strategi pemulihan kinerja UMKM pada masa COVID-19 ini sangat dibutuhkan oleh mitra Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Dinnakerkop UKM) Kabupaten Banyumas sebagai dinas yang bertugas menangani masalah UMKM [30]. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi *role model* bagi dinas-dinas yang menangani UMKM yang lain di seluruh Indonesia.

## **METODE PENELITIAN**

- a. Metode Pendekatan Penelitian : Penelitian ini menggunakan pendekatan secara kualitatif.
- b. Desain Penelitian : Pada tahun pertama merupakan penelitian eksploratif, Subjek dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Banyumas, sedangkan objek dalam penelitian ini adalah kinerja operasional UMKM. Pada tahun pertama dilakukan pemetaan kondisi UMKM, menentukan *key performance indicator* pada lingkungan internal dan eksternal melalui Observasi, wawancara, Kuesioner kemudian dianalisis dengan analisis perbandingan.
- c. Jenis penelitian : penelitian ini tergolong jenis penelitian survey, dengan menggunakan kuesioner sebagai alat pengambilan data.
- d. Jenis dan Sumber Data : Data primer dan sekunder yang diperoleh dari studi kepustakaan, *survey* mendalam menggunakan kuesioner, FGD dan lokakarya.
- e. Teknik Pengumpulan Data : pada tahun pertama dengan observasi, wawancara, dan kuesioner
- f. Informan : informan yang digunakan yaitu pemilik dan pengelola UMKM di Kabupaten Banyumas pada saat penelitian. Data per Desember 2020 di Kabupaten Banyumas terdapat 5.754 UMKM. Penentuan jumlah informan menggunakan pendekatan statistik dengan rumus Slovin
- g. Teknik Penentuan informan: Pada tahun pertama dengan metode *purposive sampling* Kriteria yang ditentukan adalah manajer atau pemilik UMKM yang mampu menjelaskan *key performance indicator* yang dicari pada setiap variable. Pada tahun kedua dan ketiga Informan ditentukan dengan metode *snowball sampling*
- h. Metode pengolahan data: Data yang terkumpul diolah dengan menggunakan metode reduksi data, display data dan kategori data. Kategorisasi data didasarkan pada metode analisis komparasi
- i. Metode penyajian data : Data yang telah diolah akan disajikan dalam bentuk teks naratif yakni suatu uraian yg sisibadngtis, logis dan rasional sesuai dengan urutan/posisi kepentingan data
- j. Metode analisis dengan menggunakan metode analisis kualitatif yang ditekankan pada model analisis perbandingan dan interpretasi data

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pandemi COVID 19 yang menyebar di belahan dunia berdampak hebat pada kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat, tidak terkecuali di Indonesia. Terhentinya mobilitas masyarakat ternyata melumpuhkan berbagai sektor yang bermula dari sektor Kesehatan merambat ke sektor lain diantaranya sektor ekonomi



sebagai penopang bergeraknya roda kehidupan masyarakat, terutama ekonomi untuk masyarakat menengah ke bawah. Pemerintah tidak tinggal diam untuk menyelamatkan perekonomian (sosial dalam skope luas), maka dilakukan berbagai stimulus ekonomi untuk meredam dampak negative yang terjadi. Berbagai stimulus sudah diluncurkan, bahkan program-program seperti ini seringkali dilakukan sebelum masa pandemi COVID 19 terjadi guna terciptanya stabilitas ekonomi. Stimulus ekonomi yang diluncurkan diutamakan untuk para pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), dengan pertimbangan karena hampir 98 persen perekonomian di Indonesia digerakan oleh UMKM.

Survei yang dilengkapi dengan wawancara kepada pelaku UMKM di Kabupaten Banyumas dilaksanakan guna memahami dampak pandemi COVID 19 terhadap keberlangsungan kegiatan bisnis, daya tahan dan strategis yang dilakukan UMKM dengan ataupun tanpa dukungan kebijakan pemerintah. Sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh UMKM tidak saja dikarenakan terjadinya pandemi COVID 19 saja, karena sejauh ini banyak persoalan yang muncul dan dipecahkan hanya melalui bantuan pendanaan. Memang UMKM masuk pada kelompok pembisnis yang tidak *bankable*, maka stimulus ekonomi yang dilakukan pemerintah melalui berbagai bantuan kredit berbunga rendah yang dikucurkan dari berbagai kementerian atau Lembaga berakhir tanpa diketahui bagaimana dampaknya terhadap perkembangan bisnis UMKM. Sebelum menetapkan model pemulihan kinerja UMKM, maka terlebih dahulu dilakukan pemetaan kondisi UMKM di Kabupaten Banyumas.

Survey yang disebarakan dapat menjangring bidang usaha dengan hasil Pertanian, Kehutanan & Perikanan 4,4 %, Industri Pengolahan 14,6 %, , Pengolahan Air, Air limbah, Daur Ulang Sampah, & Aktivitas Remediasi 3,4 % , Perdagangan Besar & Eceran 23,7 % , Reparasi Mobil & Motor, Transportasi & Pergudangan 2,2% , Informasi & Komunikasi 2,2% , Perusahaan Jasa (Pendidikan, Kesehatan, akomodasi) 7,8% , Penyediaan Makanan & Minuman 41,7%,

Jumlah tenaga kerja yang terlibat dalam kegiatan bisnis UMKM sebagian besar merupakan mereka yang bekerja sendiri dan yang berjumlah 1 sampai 5 orang. Dengan demikian data yang diperoleh merupakan para wirausaha mikro dan kecil. Cara penjualan produknya Sebagian besar dilakukan secara langsung dengan membuka gerai (toko/lapak) ataupun melalui penyalur (agen), namun demikian ada beberapa yang menggunakan fasilitas sosial media

Adapun kinerja usaha UMKM selama masa pandemi COVID 19 yang terwakili oleh 5 indikator adalah

1. Dampak pandemi Covid 19 terhadap besarnya omset penjualan 9,4% terjadi penurunan lebih dari 75% , 45,9% terjadi penurunan antara 50% sampai 75% , 23,5% terjadi penurunan dibawah 50% , 14% tidak terjadi penurunan omset penjualan (tetap) , 7,2% mengalami kenaikan omset penjualan,
2. Dampak pandemi Covid 19 terhadap besarnya keuntungan 14,1% terjadi penurunan lebih dari 75% , 47% terjadi penurunan antara 50% sampai 75% , 20% terjadi penurunan dibawah 50% , 14,1% tidak terjadi penurunan keuntungan (tetap) 4,9% mengalami kenaikan
3. Dampak pandemi Covid 19 terhadap biaya bahan baku 23,5% menyatakan biaya bahan baku tetap, walaupun ada kenaikan masih dibawah 50%
4. Dampak pandemi Covid 19 terhadap biaya tenaga kerja/upah/gaji 47% menyatakan tidak terjadi kenaikan biaya tenaga kerja, sisanya hanya terjadi penurunan pendapatan karena sebagian besar pelaku UMKM hanya bekerja sendiri (mikro)
5. Dampak pandemi Covid 19 terhadap biaya transportasi 66% menyatakan tidak terjadi kenaikan biaya transportasi (tetap).

Strategi usaha yang dilakukan dalam menyiasati dampak pandemik 19 dalam mempertahankan keberlangsungan bisnisnya, hasil survey menyatakan sebagai berikut:

1. Mencari pemasok bahan baku yang lebih murah 57,6% tidak melakukan strategi ini 42,4% melakukannya
2. Menurunkan spesifikasi/kualitas bahan baku Tidak melakukan penurunan kualitas bahan baku



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"*

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

---

3. Pembelian bahan baku dalam jumlah besar untukantisipasi kenaikan harga 74,1% tidak dilakukan karena permintaan akan produk menurun antara 50-75%
4. Mengurangi jumlah tenaga kerja 87% tidak melakukan pengurangan tenaga kerja karena jumlah tk terbatas (1-5) dan sdh terikat sebagai anggota keluarga
5. Mengurangi jumlah upah pekerja 88,2% tidak melakukan pengurangan jumlah upah karena jumlah tk terbatas (1-5) dan sdh terikat sebagai anggota keluarga,
6. Merubah cara pembayaran upah (dari bulanan menjadi mingguan/harian) 74,1% tidak melakukan perubahan cara pembayaran upah karena jumlah tk terbatas (1-5) dan sdh terikat sebagai anggota keluarga
7. Meminta penundaan pembayaran cicilan hutang 4,7% tidak meminta penundaan cicilan hutang karena Sebagian besar tidak mempunyai kewajiban ini (terkait pernyataan no.10)
8. Meminta keringanan cicilan/bulan 84,7% tidak meminta keringanan cicilan hutang karena sebagian besar tidak mempunyai kewajiban ini (terkait pernyataan no.10)
9. Meminta keringanan bunga pinjaman 84,7% tidak meminta keringanan bunga pinjaman karena sebagian besar tidak mempunyai kewajiban ini .
10. Tidak memiliki hutang 90,6% tidak memiliki hutang.
11. Berapa lama usaha dapat bertahan Sulit diprediksi karena sifat bisnis UMKM yang sangat fleksibel

### **Kegiatan Produksi selama Pandemi Covid 19**

1. Ketercukupan jumlah bahan baku untuk memproduksi/ jumlah sumber daya untuk pelayanan jasa 100% tidak menjadi prioritas
2. Kesesuaian dengan kapasitas produksi dan standar prosedur operasional (SOP) untuk produksi barang atau pelayanan jasa 82% tidak terdapat standar prosedur operasional yang baku tertulis, karena pelaku usaha adalah pelaksana operasional langsung
3. Pelaksanaan produksi atau pelayanan jasa tepat waktu dalam 1 siklus proses 82% idem no 2
4. Mesin dan peralatan untuk proses produksi barang atau pelayanan jasa berfungsi dengan baik 24% menyatakan bahwa alat penunjang produksi berjalan dengan baik, sedangkan sebesar 76% adalah sebaliknya.
5. Produk atau layanan jasa sesuai target dan diterima konsumen 34,4% produk ataupun layanan jasa yang dihasilkan sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan konsumen, sedangkan 65,6% adalah sebaliknya
6. Adanya inovasi produk atau layanan jasa Sebesar 25% pelaku UMKM telah melakukan berbagai inovasi produk atau layanan jasa untuk memenuhi permintaan pelanggan, sedangkan 75% belum melakukannya.

### **Good Manufacturing Practice (GMP)**

1. Lingkungan lokasi sarana produksi atau pelayanan jasa memenuhi syarat standar prosedur produksi barang atau pelayanan jasa yang baik (GMP) 85,9% memenuhi syarat standar produksi
2. Tidak ada potensi timbulnya pencemaran lingkungan 63,1% tidak ada potensi pencemaran pada lingkungan, sedangkan 36,9% berpotensi mencemari lingkungan
3. Adanya Kebersihan dan keteraturan fasilitas proses produksi atau pelayanan jasa terjamin 99% menjamin kebersihan dan keteraturan fasilitas proses produksi
4. Adanya Kebersihan karyawan, peralatan dan Gudang untuk produksi barang dan pelayanan jasa terjamin Sebesar 91,2% menyatakan menjamin kebersihan alat dan pelaksana produksi
5. Penanganan bahan baku dan hasil produksi atau pelayanan jasa sesuai syarat GMP 75,4% menyatakan bahwa penanganan bahan baku dan hasil produksi atau pelayanan jasa sesuai dengan persyaratan yang dibakukan (standar).
6. Proses produksi atau pelayanan jasa terkendali sesuai syarat GMP 71,9% menyatakan bahwa proses produksi atau pelayanan jasa dapat dikendalikan sesuai dengan standar yang ditetapkan.
7. Pengemasan, penyimpanan dan pengendalian pasca produksi atau pelayanan jasa sesuai syarat GMP. 43,8% menyatakan bahwa pengemasan, penyimpanan, dan pengendalian pasca produksi atau



pelayanan jasa sesuai standar. 56,2% tidak memenuhi standar pengemasan, penyimpanan, dan pengendalian pasca produksi/pelayanan jasa.

### **Pengendalian Kualitas (Quality Control)**

1. Adanya dokumen tertulis terkait bahan baku (kuantitas dan kualitas, tanggal kadaluarsa, pemasok). 70% tidak ada dokumen tertulis
2. Ada dokumentasi standar Operasional Prosedur (SOP) produksi 67% tidak ada dokumentasi SOP
3. Ada dokumentasi pelaksanaan produksi 65% tidak ada dokumen pelaksanaan produksi
4. Ada dokumentasi target kualitas produk 69% tidak ada dokumen target kualitas
5. Ada dokumentasi hasil penilaian kualitas produk 73,5% tidak ada dokumen hasil penilaian kualitas
6. Ada dokumentasi perawatan alat, ruang, fasilitas kebersihan dan penanganan limbah 75% tidak ada dokumentasi perawatan alat, ruang, fasilitas kebersihan dan penanganan limbah

### **Branding, Packing, Labelling, & Kekayaan Intelektual**

1. Ada Brand berbeda dari kopetitor (original) 65,9% brand sama dengan kompetitor, sedangkan 34,1% sudah memiliki brand sendiri (mayoritas oleh UMKM makanan dan minuman)
2. Ada upaya untuk membangun brand produk 39,7% berupaya untuk membangun brand produknya, sedangkan 60,3% tidak berupaya untuk membangun brand karena sifat produk yang dihasilkannya atau keterbatasan yang dimiliki pelaku umkm.
3. Ada alokasi biaya untuk pembuatan pengemasan 50% mengalokasikan biaya untuk membuat pengemasan
4. Tidak ada Komplain terhadap kenyamanan penggunaan kemasan dari konsumen 35,2% pelaku umkm menyatakan bahwa tidak ada complain terhadap kenyamanan penggunaan kemasan, sedangkan sisanya 64,8% complain tidak ada karena sifat produk atau jasa yang tidak memerlukan kemasan atau kemasan sederhana (plastic) yang sudah dianggap umum.
5. Penggunaan material dengan disain kemasan yang tepat dan mampu melindungi produk Pernyataan bahwa 87,5% pelaku umkm sudah menggunakan material kemasan yang tepat lebih kearah bahan plastic yang umum digunakan.
6. Mencantumkan persyaratan labelling sesuai UU dan Peraturan Pemerintah lainnya 79,5% tidak mencantumkan persyaratan labeling sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pemasaran**

1. Adanya pertumbuhan penjualan per siklus. 51,1% tidak ada pertumbuhan penjualan per siklus selama pandemic covid 19. 48,9% ada pertumbuhan penjualan per siklus
2. Adanya pelanggan tetap. 94,3% terdapat pelanggan tetap. 5,7% tidak ada pelanggan tetap
3. Adanya peningkatan konsumen dalam 1 tahun. 86,4% terjadi peningkatan konsumen dalam satu tahun terakhir. 13,6% tidak terjadi peningkatan konsumen
4. Tidak ada komplain dari konsumen. 63,6% tidak terjadi complain dari konsumen, sedangkan 36,4% ada complain dari konsumen.
5. Ada alokasi biaya produksi. 75% ada alokasi untuk biaya produksi
6. Ada upaya untuk memasarkan produk. 88,63% ada upaya untuk memasarkan produk dengan berbagai cara/ menggunakan media online.
7. Ada inovasi pemasaran. 46,6% ada inovasi untuk melakukan pemasaran

### **Manajemen Keuangan**

1. Ada pemisahan pengelolaan keuangan antara pribadi dan bisnis. 52,2 % tidak melakukan pemisahan pengelolaan keuangan untuk kepentingan pribadi maupun bisnisnya.
2. Ada pemisahan rekening pribadi dan bisnis. Poin 1 ditunjang dengan 84% pelaku umkm tidak



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"*

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

---

- memisahkan rekening pribadi dengan rekening untuk kepentingan bisnisnya.
3. Ada alokasi gaji pemilik dalam biaya operasional. Atas pernyataan poin 1 dan 2 di atas, maka 64,7% pelaku umkm tidak mengalokasikan gaji pemilik dalam biaya operasional.
  4. Ada pencatatan transaksi keuangan secara rutin, tepat waktu, dan sesuai dengan standar akuntansi sederhana. 55,7% pelaku umkm tidak melakukan pencatatan atas transaksi usahanya, walaupun dengan menggunakan standar pencatatan yang sederhana.
  5. Ada pencatatan jenis dan jumlah asset yang dimiliki perusahaan (terpisah dari milik pribadi) 78,4% tidak melakukan pencatatan atas jenis dan jumlah aset yang dimiliki karena aset pribadi sama dengan aset perusahaannya.
  6. Ada pencatatan tentang perubahan jenis dan nilai modal. 76,1% tidak ada pencatatan jenis dan nilai modal
  7. Ada pencatatan tentang sumber dan jumlah hutang dan piutang. 72,7% tidak ada catatan terkait sumber dan jumlah hutang serta piutang yang dimiliki. Jadi hanya mengandalkan daya ingat.
  8. Ada petugas khusus pengelola keuangan. 85,2% tidak ada/tidak memerlukan pengelola keuangan
  9. Ada penyimpanan bukti transaksi. 68,2% para pelaku umkm tidak mendokumentasikan (filling) bukti transaksi bisnisnya.

### **Permodalan dan Literasi**

1. Ada pengetahuan tentang syarat dan mekanisme pengajuan kredit/pinjaman ke Lembaga keuangan (bank dan non-bank) 56,8% pelaku umkm memiliki pengetahuan tentang syarat dan mekanisme pengajuan kredit ke Lembaga keuangan bank atau non-bank
2. Ada pengetahuan tentang skema bantuan keuangan/kredit pemerintah. 56,8% pelaku umkm memiliki pengetahuan tentang skema bantuan keuangan/kredit dari pihak pemerintah
3. Ada pengetahuan tentang risiko kredit baik dari Lembaga keuangan (bank/non-bank) 55,7% pelaku umkm memiliki pengetahuan tentang risiko kredit yang disalurkan melalui lembaga keuangan (bank & non-bank)
4. Ada kepemilikan dan penggunaan produk/jasa layanan Lembaga keuangan (tabungan, deposito, kredit) 1 tahun terakhir. 51,1% pelaku umkm memiliki dan menggunakan jasa pelayanan Lembaga keuangan (tabungan, deposito, atau kredit)
5. Berapa % diterima pengajuan dengan total pengajuan pinjaman/kredit kepada Lembaga keuangan (bank dan non-bank) dalam 1 tahun. Pelaku usaha yang pernah mengajukan kredit/pinjaman ke Lembaga keuangan mendapat total pinjaman sebesar 75% sampai 100% dari pengajuannya. Khususnya bagi pelaku UMKM yang bergerak di bidang usaha perdagangan dan industri pengolahan.
6. Berapa % diterima pengajuan dengan total pengajuan skema bantuan keuangan/kredit pemerintah dalam 1 tahun. Pelaku umkm yang pernah menerima bantuan keuangan/kredit dari pemerintah mendapat total bantuan/pinjaman berkisar 10% sampai 100% dari jumlah yang diajukan. Sebagian besar diterima oleh pengusaha di bidang usaha perdagangan dan industri pengolahan.

### **Kelembagaan**

1. Ada Ketersediaan akses permodalan dari mitra lain. 86,3% tidak ada akses permodalan dari mitra lain
2. Ada Legalitas usaha 73,8% tidak ada legalitas yang dimiliki atas kegiatan usaha mereka.
3. Keikutsertaan dalam jaminan sosial (BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan atau asuransi lain) 71,6% mereka tidak ikut serta dalam jaminan sosial, baik untuk Kesehatan maupun untuk ketenagakerjaan ataupun asuransi lainnya.
4. Adanya jejaring dengan pemerintah, perguruan tinggi, swasta atau Lembaga lain. 92% mereka tidak memiliki jaringan Kerjasama baik dengan pemerintah maupun instansi lain seperti Perguruan Tinggi, swasta, atau Lembaga lainnya.
5. Adanya kemitraan yang menjamin ketersediaan bahan baku. 61,4% mereka tidak memiliki kemitraan yang menjamin ketersediaan bahan baku yang mereka perlukan.
6. Adanya kemitraan yang menjamin pemasaran produk 73,8% pelaku umkm tidak memiliki kemitraan yang menjamin pemasaran produk yang mereka hasilkan



## **Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers**

*"Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI"*

12-14 Oktober 2021

Purwokerto

ISBN 978-602-1643-67-9

---

7. Menjadi anggota perkumpulan usaha 73,8% mereka tidak terikat dengan suatu organisasi dalam kegiatan usahanya.

### **Sumber Daya Manusia (SDM)**

1. Kesesuaian hasil rekrutmen dan kebutuhan kualifikasi karyawan 71,6% kualifikasi karyawan tidak sesuai dengan hasil rekrutmennya
2. Adanya pelatihan bagi karyawan baru 67% pelaku umkm tidak melakukan pelatihan bagi karyawan baru, jadi learning by doing.
3. Adanya pelatihan berkala untuk peningkatan kualitas SDM 77% tidak ada pelatihan berkala untuk peningkatan kualitas SDM
4. Adanya pelaksanaan evaluasi kinerja karyawan 73,8% tidak dilakukan evaluasi atas kinerja karyawan. Hal ini terutama bagi pelaku umkm yang bekerja sendiri.

### **Karakter dan Perilaku**

1. Ada kesesuaian dalam melaksanakan kontrak kerja terhadap karyawan dan mitra usaha 76,1% tidak ada kesesuaian dalam melaksanakan kontrak kerja, baik terhadap karyawan maupun mitra usaha. Lemahnya indikator ini dikarenakan minimnya tingkat pendokumentasian dan tata kelola
2. Adanya keterbukaan informasi terhadap konsumen (kejelasan informasi) 71,6% terdapat keterbukaan informasi kepada konsumen terkait dengan produk/jasa dan harga yang mereka tetapkan.
3. Adanya komplain dari pelanggan 81,8% menyatakan bahwa tidak ada komplain dari pelanggan
4. Adanya jaminan kuantitas dan kualitas produk 64,8% terdapat jaminan atas kuantitas dan kualitas produk

### **Perizinan**

1. Memiliki izin usaha yang dikelola oleh Lembaga OSS (one single submission) berupa NIB (Nomor Induk Berusaha) 76,1% tidak memiliki izin usaha sesuai dengan ketentuan
2. Memiliki izin komersial atau operasional yang dikelola oleh Lembaga OSS 81,8% tidak memiliki izin komersial ataupun operasional
3. Memiliki IMB, Izin Lokasi, dan Izin Lingkungan 68,2% tidak memiliki IMB, ijin lokasi dan ijin lingkungan.

## **KESIMPULAN**

Analisis menggunakan indikator pada aspek produksi, pengendalian kualitas, GMP, SDM, perizinan, manajemen keuangan, pemasaran, modal dan literasi, kelembagaan, serta brand, packing, labelling dan kekayaan intelektual, maka dapat disimpulkan permasalahan yang dihadapi UMKM sebagai berikut :

1. Permasalahan sumber daya manusia yang memerlukan peningkatan kemampuan literasi di bidang manajemen keuangan untuk dapat memisahkan aset, kewajiban, dan modal usaha mereka dengan kepentingan pribadinya. Hal ini harus didukung dengan kedisiplinan pengadministrasiannya, sehingga diperoleh informasi yang memadai dalam membuat perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian usahanya.
2. Kebiasaan untuk mendokumentasikan berbagai hal termasuk menyusun standar operasional prosedur (SOP) yang sederhana sekalipun pada proses produksi barang atau jasa untuk dapat dievaluasi dan ditingkatkan kualitasnya setiap saat, sehingga dapat memicu inovasi dalam aspek produksi sekaligus peningkatan pengendalian kualitas (quality control).
3. Peningkatan literasi tentang GMP yang terkait erat dengan aspek produksi yang didalamnya termasuk kepedulian terhadap kebersihan, keselamatan lingkungan pekerjaan dan lingkungan sekitar



tempat UMKM beroperasi. Pentingnya pengetahuan dan implementasi aspek ini menjamin keberlangsungan usaha UMKM.

4. Aspek perizinan dan kelembagaan menjadi pekerjaan rumah pemerintah dengan kementerian terkait sebagai pihak yang memberikan perlindungan dan jaminan berusaha bagi UMKM agar mereka dapat tetap menyumbangkan pembangunan di sektor ekonomi yang lebih luas.

## **UCAPAN TERIMA KASIH**

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Jenderal Soedirman atas pembiayaan penelitian ini melalui Hibah Penelitian BLU ini.

## **DAFTAR PUSTAKA**

V. Rivai. (2005). *Manajemen Sumber Daya Manusia untuk Perusahaan, dari Teori ke Praktik*. Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada.

Sulistiyowati, E., & Lestari, N. S. (2016). Faktor Faktor penentu keberhasilan usaha kecil dan Menengah di Kota Yogyakarta. *Jurnal MAKSIPRENEUR*, VI(1), 24–36.

Lofian. (2016). *Identifikasi Faktor Eksternal Dan Faktor Internal Yang Berpengaruh Terhadap Kinerja UKM Mebel dan Rotan di Jepara*. Disprotek, 5(2), 8–15. Haeruman (2000). *Akses modal dalam UKM*, Andi Ofset, Yogyakarta

Haeruman, H. 2000. *Peningkatan Daya Saing UMKM untuk Mendukung Program PEL*. Makalah Seminar Peningkatan Daya Saing, Graha Sucofindo, Jakarta. <http://lipi.go.id/siaranpress/diagnosis-ekonomi-nasional-terhadap-kinerja-umkm-di-pandemi-covid-19/22069>

[https://www.antara-news.com/berita/1874212/presiden-jokowi-ekonomi-indonesia-sudah-lewati-titik-terendahnya?utm\\_source=izotoo&utm\\_medium=push\\_notification&utm\\_campaign=news\\_push](https://www.antara-news.com/berita/1874212/presiden-jokowi-ekonomi-indonesia-sudah-lewati-titik-terendahnya?utm_source=izotoo&utm_medium=push_notification&utm_campaign=news_push)

Nugroho, Agus Eko. (2020). *Survei Kinerja UMKM di Masa Pandemi Covid-19*. <http://lipi.go.id/berita/survei-kinerja-umkm-di-masa-pandemi-covid19/22071>, diakses 11 Oktober 2020

<https://www.antaranews.com/berita/1636930/menyongsong-kebangkitan-umkm-banyumas-pada-era-adaptasi-kebiasaan-baru>

Peraturan Bupati Banyumas No 60 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja, Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Kabupaten Banyumas.